

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM KARYAWAN NOTARIS PADA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

Notaris dalam eksistensinya menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhadap karyawan karena biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk suatu pekerjaan menjadi lebih kecil, karena Notaris tidak harus memiliki tenaga kerja/pekerja dalam jumlah yang banyak. Sebagaimana diketahui apabila Notaris memiliki pekerja yang banyak, maka Notaris harus memberikan berbagai tunjangan untuk kesejahteraan para pekerja.

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan serta bagaimana kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan atau yang digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan yaitu dengan mengupayakan langkah represif dalam implikasinya terhadap tenaga kerja bagi karyawan notaris di Kota Pekalongan, terdapat pengawas dalam struktur Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Pekalongan serta Lembaga Kerja Sama Tripartit yang (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan, mengenai kelemahan-kelemahan dan solusinya pelaksanaan perlindungan hukum karyawan notaris pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di Kota Pekalongan dikarenakan ketidakjelasan dalam ketentuan mengenai PKWT seperti inkonsistensi antara Pasal yang satu dengan Pasal yang lainnya, masih menjadi problematik, karena Pekerja yang bekerja atas dasar perjanjian kerja waktu tertentu kurang mendapatkan perlindungan hukum jika dibandingkan dengan pekerja yang bekerja atas dasar PKWT.

Saran dari penelitian ini adalah kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan diharapkan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih memperhatikan hak-hak dari Tenaga Kerja di Kota Pekalongan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan Notaris.*

ABSTRACT

LEGAL PERSONAL PROTECTION OF THE NOTARIES IN CERTAIN TIME WELDING (PKWT)

Notaries in existence apply a Working Time Agreement (PKWT) to employees because the cost incurred by the Notary for a job becomes smaller, since the Notary does not have to have a large number of workers / workers. As it is known that the Notary has many employees, the Notary must provide various benefits for the welfare of the workers.

The problem studied in this research is how the implementation of legal protection of legal notary employees at certain time working agreement (PKWT) in Pekalongan City and how the weaknesses and solution of the implementation of legal protection of notary employee at certain time ape agreement (PKWT) in Pekalongan City.

The method used in this study is by empirical juridical method is an approach done or used to be a reference in highlighting the problems of applicable legal aspects.

The result of this research ultimately gives the answer that the implementation of legal protection of legal notary employee in certain time working agreement (PKWT) in Pekalongan City is by seeking repressive step in its implication to labor for notary employee in Pekalongan City, there is supervisor in structure of Department of Labor and Social (Disnakersos) Pekalongan City and Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartit) which is a forum of communication, consultation and deliberation on labor issues, concerning the weaknesses and the solution of the implementation of legal protection of notary employees at certain time ape agreement (PKWT) in Kota Pekalongan because the uncertainty in the provisions on PKWT, such as inconsistencies between the one article and another, is still problematic, since workers working on a certain time work contract lack legal protection when compared to workers working on the basis of PKWTT.

Suggestions from this research is to the Manpower Office of Pekalongan City is expected to better utilize the existing Human Resources (HR) so that can tasks and roles in accordance with the provisions of applicable legislation in order to pay more attention to the rights of Labor in Pekalongan City .

Keywords: *Legal Protection, Specific Time Working Agreement, and Notary.*